Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Halaman: 185 – 191

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Urgensi Transformasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandung

Edwin Alfian[1], Rita Kusuma Astuti[2], Pascalis Danny Kristi Wibowo[3]
Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

alfianedwin@yahoo.com[1], ritakusumaastuti@gmail.com[2], pascalisdkw@gmail.com[3]

Kata Kunci:
Kelembagaan Imigrasi, Transformasi Organisasi, Teori Kontingensi

Abstrak

Transformasi kelembagaan menjadi keharusan dalam menghadapi kompleksitas pelayanan publik, termasuk dalam sektor keimigrasian. Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat memiliki intensitas mobilitas penduduk dan dinamika regional yang tinggi, namun status kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung belum mengalami peningkatan yang sesuai dengan beban kerja yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi transformasi Kanim Bandung menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI dengan mempertimbangkan aspek beban kerja, cakupan wilayah, dan proyeksi dinamika keimigrasian di masa depan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi non partisipatif dan telaah data sekunder seperti regulasi, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kanim Bandung memiliki volume layanan paspor rata-rata 11.000 per bulan, menangani 84 kasus deportasi dalam satu tahun, dan membawahi layanan di berbagai titik wilayah. Selain itu, proyeksi masuknya tenaga kerja asing akibat investasi asing di kawasan industri Subang-Karawang memperkuat kebutuhan akan struktur kelembagaan yang lebih fleksibel dan adaptif. Analisis menggunakan Teori Kontingensi menegaskan bahwa struktur organisasi yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan status kelembagaan menjadi Kanim Kelas I Khusus TPI merupakan langkah logis untuk memperkuat kapasitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah strategis seperti Bandung.

Key Word:
Immigration Institution, Organizational Transformation, Contingency Theory

Abstract

Institutional transformation is essential in responding to the growing complexity of public services, including in the immigration sector. Bandung, as the capital of West Java Province, has high population mobility and dynamic regional activity. However, the status of the Immigration Office Class I TPI Bandung has not been upgraded in alignment with its operational demands. This study aims to analyze the urgency of transforming Kanim Bandung into an Immigration Office Class I Special TPI by examining workload, service coverage, and future immigration dynamics. The research uses a qualitative-descriptive approach, with data collected through non-participatory observation and secondary sources such as government regulations, scholarly articles, and policy documents. The findings reveal that Kanim Bandung processes approximately 11,000 passport applications per month, handles 84 deportation cases annually, and oversees immigration services across multiple service units. Furthermore, the anticipated influx of foreign workers due to foreign direct investment in the Subang-Karawang industrial corridor underscores the need for a more adaptive and flexible institutional structure. Using the Contingency Theory framework, this study confirms that effective organizations must align their structures with external demands. Therefore, upgrading Kanim Bandung to a Class I Special Immigration Office is a strategic step to enhance immigration service delivery and enforcement in this critical regional hub.

Copyright © 2025 Edwin Alfian, Rita Kusuma Astuti, Pascalis Danny Kristi Wibowo
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Di tengah transformasi global yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas penduduk lintas negara, pelayanan publik di sektor keimigrasian menjadi semakin strategis dalam kebijakan negara. Pelayanan keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung stabilitas nasional, perdagangan internasional, dan hubungan antarnegara (Rosenbloom, 2015). Negara-negara dengan intensitas pergerakan manusia yang tinggi telah menyesuaikan struktur organisasinya agar mampu merespons tantangan global tersebut dengan lebih adaptif. Dalam kerangka good governance, transformasi kelembagaan merupakan bentuk respons yang wajar dan diperlukan untuk menyesuaikan kapasitas organisasi dengan kompleksitas fungsi dan kebutuhan masyarakat (Osborne &

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Gaebler, 1992). Oleh karena itu, urgensi terhadap restrukturisasi institusi, termasuk dalam bidang keimigrasian, menjadi sorotan penting dalam kajian administrasi publik kontemporer.

Fungsi keimigrasian merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang berfungsi dalam melayani, mengatur, dan mengawasi perlintasan orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Keimigrasian bukan hanya menyangkut penerbitan dokumen perjalanan, melainkan juga menjaga kedaulatan dan keamanan negara melalui sistem pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing (Kettl, 2015). Dalam struktur pemerintahan Indonesia, fungsi ini diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki kantor-kantor pelaksana teknis di berbagai daerah. Tuntutan pelayanan keimigrasian dewasa ini kian meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, tuntutan kecepatan layanan, serta keragaman kebutuhan penduduk. Oleh karena itu, struktur organisasi pelaksana di tingkat lokal harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan kompleksitas pelayanan yang dihadapi.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan zaman, Pemerintah Indonesia melalui peraturan terbaru telah membentuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Pembentukan kementerian ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memisahkan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan dari kementerian sebelumnya guna meningkatkan fokus, efisiensi, dan efektivitas layanan. Dalam sistem baru ini, Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi unsur pelaksana utama di bidang keimigrasian yang bertanggung jawab langsung kepada kementerian. Penataan ini membuka peluang untuk melakukan penguatan struktur organisasi di kantor-kantor pelaksana teknis, termasuk melalui peningkatan kelas kelembagaan bagi kantor imigrasi yang memiliki kompleksitas fungsi lebih tinggi (Kemenimipas, 2024).

Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat memiliki posisi strategis, baik secara administratif maupun ekonomis. Kota ini menjadi simpul pertumbuhan wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan industri kreatif. Bandung juga memiliki peran penting sebagai penghubung kawasan megapolitan Jakarta-Bandung dan wilayah industri strategis di sekitarnya. Hal ini menjadikan layanan publik di Bandung, termasuk layanan keimigrasian, memiliki beban kerja yang kompleks dan beragam. Namun, hingga kini, belum banyak kajian akademik yang mengangkat secara mendalam bagaimana dinamika dan kebutuhan kelembagaan keimigrasian di kota-kota besar seperti Bandung memerlukan penyesuaian struktur yang signifikan untuk mengimbangi tuntutan tersebut.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatur klasifikasi kantor imigrasi ke dalam beberapa tingkat, yaitu Kelas I, II, III, dan Kelas I Khusus. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyesuaikan fungsi dan beban kerja kantor dengan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia yang tersedia. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus biasanya memiliki struktur yang lebih besar dan kompleks karena menangani wilayah yang lebih strategis dan berintensitas tinggi. Oleh karena itu, kenaikan status dari Kelas I menjadi Kelas I Khusus bukan semata-mata berbasis pada pertimbangan administratif, melainkan sebagai wujud adaptasi organisasi terhadap tantangan yang lebih besar dan dinamis. Penyesuaian status ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan fungsi keimigrasian tetap optimal dan relevan dengan konteks wilayah (Kemenimipas, 2024).

Meskipun kerangka hukum sudah tersedia dan arah reformasi kelembagaan telah ditetapkan, implementasi di tingkat unit pelaksana teknis masih belum merata. Terdapat kantor-kantor imigrasi di kota-kota besar yang secara faktual menghadapi tekanan kerja dan kompleksitas yang tinggi, namun belum mengalami penyesuaian status kelembagaan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas organisasi. Dalam konteks teori administrasi publik, hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas organisasi (Denhardt & Denhardt, 2015). Oleh sebab itu, kajian ilmiah berbasis analisis normatif dan kebijakan sangat diperlukan untuk mengevaluasi urgensi dan kelayakan peningkatan kelas kelembagaan kantor imigrasi tertentu agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lapangan.

Salah satu kerangka teoretis yang relevan dalam menganalisis penyesuaian kelembagaan adalah Teori Kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa struktur organisasi yang ideal harus disesuaikan dengan karakteristik lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi organisasi (Donaldson, 2001). Ketika suatu organisasi menghadapi peningkatan kompleksitas tugas, beban kerja, dan ekspektasi pelayanan, maka diperlukan perubahan dalam struktur agar tetap adaptif dan efektif. Dalam konteks ini, transformasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI adalah bentuk nyata dari penyesuaian struktural berbasis kontingensi. Transformasi tersebut dapat memperkuat fungsi kelembagaan untuk menjawab tantangan yang berkembang di wilayah strategis seperti Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Mengapa transformasi kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI penting untuk dilakukan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan institusional dalam konteks struktur kelembagaan keimigrasian di wilayah strategis serta mengevaluasi kesesuaian antara

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

beban kerja dengan klasifikasi organisasi yang berlaku. Adapun manfaat penelitian ini secara akademis adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya di bidang tata kelola kelembagaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan dalam melakukan reformasi struktural berbasis kebutuhan lapangan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014), yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena berdasarkan makna yang dibangun oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi transformasi kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung secara komprehensif dengan menggabungkan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Data primer diperoleh melalui observasi non partisipatif, di mana peneliti mengamati langsung aktivitas dan dinamika kelembagaan tanpa terlibat secara aktif dalam proses yang berlangsung. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan resmi, artikel ilmiah, serta sumber daring kredibel yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka Teori Kontingensi (Donaldson, 2001), yang menekankan bahwa efektivitas organisasi sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kondisi lingkungan dan kompleksitas tugas; dalam hal ini, transformasi status kelembagaan Kanim Bandung menjadi bentuk adaptasi struktural terhadap tantangan eksternal yang semakin tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Beban Kerja dan Kompleksitas Pelayanan Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menempati posisi strategis dalam sistem pelayanan keimigrasian nasional karena berada di wilayah dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan cakupan pelayanan yang luas. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif. Hal ini menjadikan arus keluar-masuk warga negara Indonesia (WNI) maupun orang asing di wilayah ini tergolong tinggi. Dalam kerangka pelayanan publik, lonjakan permintaan terhadap layanan keimigrasian seperti permohonan paspor, izin tinggal, dan pengawasan orang asing, tidak bisa dipisahkan dari dinamika regional Bandung. Oleh karena itu, organisasi pelaksana keimigrasian seperti Kanim Bandung dituntut untuk memiliki kapasitas kelembagaan yang selaras dengan kompleksitas lingkungan eksternal tersebut. Ketika beban kerja meningkat namun struktur organisasi tetap konvensional, maka efektivitas dan efisiensi layanan dapat terganggu.

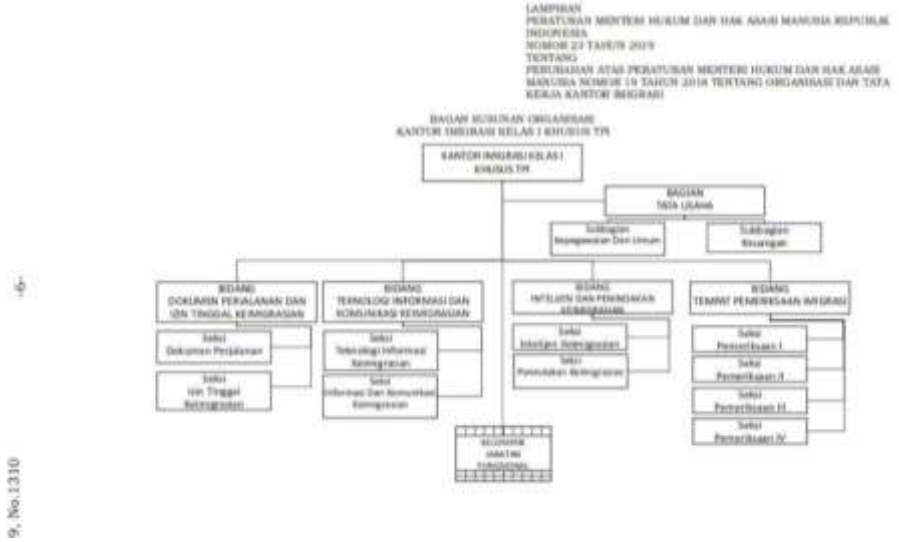
Salah satu indikator utama tingginya beban kerja di Kanim Bandung adalah volume permohonan paspor yang mencapai rata-rata 11.000 per bulan. Jika diasumsikan ada 20 hari kerja efektif dalam sebulan, maka kantor ini harus melayani sekitar 550 pemohon setiap hari. Angka ini tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan Kanim lainnya. Permohonan dalam jumlah tersebut membutuhkan sistem pelayanan yang terotomatisasi, kapasitas antrean yang besar, petugas yang terlatih, serta dukungan manajerial yang kuat. Namun, struktur organisasi yang masih dalam status Kelas I biasa menjadikan kantor ini tidak memiliki fleksibilitas yang cukup dalam manajemen unit layanan. Dalam praktiknya, beban kerja yang tinggi ini juga dapat berdampak pada menurunnya kualitas layanan, keterlambatan proses, dan keluhan dari masyarakat. Dwiyanto (2018) menyatakan bahwa indikator kinerja pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari output, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dalam menjaga konsistensi kualitas di tengah lonjakan permintaan.

Selain pelayanan administratif, beban kerja Kanim Bandung juga tinggi pada aspek pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Berdasarkan dokumentasi yang tersedia, tercatat sebanyak 84 WNA telah dideportasi dalam satu tahun terakhir karena pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian. Proses deportasi tidak hanya melibatkan prosedur administratif, tetapi juga investigasi, kerja sama intelijen, koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya, serta pengawalan. Semua proses ini memerlukan struktur organisasi yang memiliki bidang-bidang khusus, seperti intelijen dan penindakan. Dalam struktur Kelas I biasa, fungsi tersebut hanya ditangani dalam bentuk satu seksi, sehingga pembagian kerja tidak dapat dilakukan secara mendalam dan terfokus. Bandingkan dengan struktur Kanim Kelas I Khusus TPI, yang memiliki bidang terpisah untuk intelijen dan penindakan serta subdivisi tugas yang lebih spesifik, sehingga memungkinkan penanganan pelanggaran keimigrasian secara lebih profesional dan efisien.

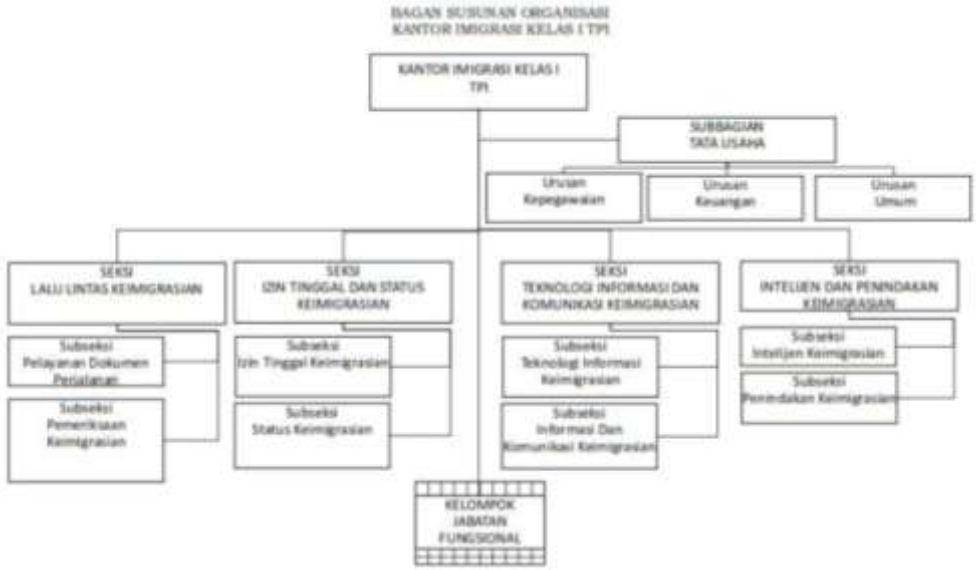
Permenkumham No. 23 Tahun 2019 menjelaskan secara rinci perbedaan antara struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I dan Kelas I Khusus TPI. Kanim Kelas I memiliki struktur yang cenderung linier, dengan lima seksi utama di bawah kepala kantor. Ini berarti banyak fungsi yang harus dirangkap oleh satu seksi atau bahkan satu petugas. Misalnya, seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal bertanggung jawab terhadap lalu lintas keluar-masuk orang, pemrosesan izin tinggal, hingga pengawasan lapangan. Sementara dalam Kanim

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Khusus, fungsi ini terbagi dalam bidang-bidang fungsional yang lebih spesifik, seperti Bidang Pemeriksaan dan Bidang Izin Tinggal, yang masing-masing memiliki empat seksi atau lebih. Dengan pembagian kerja yang rinci, Kanim Khusus dapat merespons dinamika keimigrasian dengan lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, struktur organisasi bukan hanya soal jumlah unit kerja, tetapi tentang kemampuan organisasi untuk mendistribusikan fungsi sesuai beban tugas dan tuntutan wilayah.



Gambar 1. Organisasi dan Tata Laksana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI
Sumber: Permenkumham No. 23 Tahun 2019



Gambar 2. Organisasi dan Tata Laksana Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Sumber: Permenkumham No. 23 Tahun 2019

Untuk memperjelas urgensi transformasi kelembagaan, perbandingan struktur organisasi antara Kanim Bandung dan Kanim Kelas I Khusus menjadi penting. Gambar 1 dan Gambar 2 yang disajikan dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa Kanim Khusus memiliki lebih banyak bidang dan seksi operasional yang menangani fungsi spesifik seperti Bidang Pemeriksaan Keimigrasian yang terdiri dari empat seksi pemeriksaan. Dalam hal ini, struktur memungkinkan adanya pembagian peran antara petugas frontliner, verifikator, hingga penyidik. Berbeda halnya dengan Kanim Kelas I biasa seperti Bandung, di mana satu seksi harus menangani berbagai proses mulai dari penerimaan hingga pelaporan. Ketidakseimbangan antara beban dan struktur ini dapat berdampak pada overload kerja, kurangnya kontrol internal, serta risiko kesalahan prosedural yang tinggi. Maka, secara logis dan empiris, peningkatan status kelembagaan menjadi pilihan yang rasional.

Wilayah kerja Kanim Bandung yang luas juga menjadi indikator lain dari kompleksitas pelayanan. Saat ini, Kanim Bandung membawahi lima Mal Pelayanan Publik (MPP), satu Unit Layanan Paspor (ULP), dan satu Layanan Paspor Simpatik Akhir Pekan (LPSA) di Subang. Hal ini berarti Kanim Bandung harus mengelola distribusi layanan di berbagai titik geografis yang memerlukan koordinasi SDM, dukungan sarana prasarana, dan sistem pengawasan yang kuat. Layanan yang tersebar di berbagai lokasi juga menambah beban

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

pada sisi logistik dan monitoring. Menurut Dwiyanto (2008), institusi pelayanan publik yang memiliki struktur koordinasi yang lemah pada layanan terdesentralisasi akan menghadapi risiko ketidakterpaduan dalam pelaksanaan tugas, yang dapat menurunkan kualitas layanan secara keseluruhan. Dalam hal ini, struktur Kanim Khusus lebih ideal karena memberikan kewenangan lebih besar bagi unit fungsional untuk mengelola layanan secara mandiri dengan supervisi yang lebih fokus.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga mengoperasikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) meskipun dengan volume perlintasan rendah, yakni sekitar satu kapal ekspor-impor per minggu. Namun, keberadaan TPI tetap memerlukan kesiapan kelembagaan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Permenkumham No. 9 Tahun 2024 menetapkan bahwa pemeriksaan keimigrasian harus dilakukan oleh petugas terlatih dengan struktur organisasi yang memungkinkan pelaksanaan fungsi pemeriksaan, analisis dokumen, dan tindakan lanjut dalam satu sistem kerja. Struktur Kelas I yang terbatas menyulitkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai regulasi tersebut. Sebaliknya, Kanim Kelas I Khusus memiliki struktur Bidang Pemeriksaan TPI yang memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan secara lebih profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, aspek TPI ini turut memperkuat urgensi transformasi status kelembagaan agar sejalan dengan mandat fungsi kontrol perlintasan negara.

Keterbatasan struktur saat ini menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang, terutama pada seksi-seksi yang memiliki lingkup kerja luas. Misalnya, Seksi Izin Tinggal di Kanim Bandung tidak hanya melayani permohonan izin tinggal sementara dan tetap, tetapi juga menangani laporan keberadaan WNA, perpanjangan izin, serta penolakan dan pembatalan izin. Beban tugas ini besar, tetapi tidak diimbangi dengan pembagian struktur kerja yang memadai. Dalam organisasi publik, kondisi seperti ini disebut sebagai "overcentralization of function" yang berisiko menimbulkan ketidakakuratan, ketidakefisienan, bahkan burnout pada petugas (Rosenbloom et al., 2015). Dengan peningkatan status kelembagaan, unit-unit ini akan memperoleh alokasi SDM, pembagian tugas, dan fasilitas yang lebih optimal untuk mengelola kompleksitas pekerjaan secara profesional.

Dari perspektif teoritis, transformasi kelembagaan Kanim Bandung sangat sesuai dengan prinsip Teori Kontingensi yang dikembangkan oleh Donaldson (2001). Teori ini menyatakan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang strukturnya mampu menyesuaikan diri dengan tantangan lingkungan eksternal. Dalam konteks keimigrasian, tantangan tersebut bisa berupa perubahan kebijakan global, peningkatan volume permohonan, serta intensitas pelanggaran keimigrasian. Ketika struktur organisasi tidak berubah mengikuti perkembangan eksternal, maka ketimpangan akan terus terjadi dan menghambat kinerja institusi. Transformasi kelembagaan dari Kelas I menjadi Kelas I Khusus akan membuka ruang untuk memperkuat fleksibilitas, distribusi beban kerja, serta pengawasan lintas fungsi secara sistematis.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung secara obyektif telah memenuhi indikator kebutuhan untuk ditingkatkan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI. Peningkatan status ini penting bukan hanya sebagai pengakuan terhadap beban kerja yang tinggi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kompleksitas fungsi pelayanan dan pengawasan yang dijalankan. Dengan status kelembagaan yang baru, diharapkan pelayanan keimigrasian menjadi lebih efisien, terkoordinasi, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan keimigrasian di wilayah Jawa Barat secara menyeluruh dan terintegrasi.

Analisis Posisi Strategis dan Proyeksi Dinamika Keimigrasian Wilayah Kerja

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat menempati posisi strategis dalam konteks nasional. Selain sebagai pusat pemerintahan, kota ini juga menjadi poros utama dalam bidang pendidikan, perdagangan, industri kreatif, dan pariwisata. Mobilitas masyarakat yang tinggi, baik domestik maupun internasional, menjadikan Bandung sebagai simpul aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kebutuhan layanan keimigrasian. Keberadaan Kantor Imigrasi di wilayah ini bukan hanya sebagai pelaksana teknis administratif, tetapi sebagai ujung tombak negara dalam pengelolaan arus manusia lintas batas di wilayah strategis. Oleh sebab itu, status kelembagaan Kanim Bandung harus merepresentasikan fungsi, cakupan, dan kompleksitas kerja yang diemban

Jika dibandingkan dengan kota-kota besar lain yang berstatus sebagai ibu kota provinsi seperti Jakarta, Surabaya, dan Batam, semuanya telah memiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI, maka Bandung menjadi pengecualian yang patut dipertanyakan. Padahal, dari aspek kepadatan penduduk, dinamika mobilitas penduduk, dan urgensi pengawasan terhadap orang asing, Bandung memiliki indikator yang serupa, bahkan dalam beberapa hal lebih kompleks. Kesenjangan status kelembagaan ini menimbulkan risiko ketidaksesuaian antara struktur organisasi dan beban operasional yang ditanggung. Dalam konteks administrasi publik, ketidakseimbangan seperti ini dapat menyebabkan ketidakefisienan struktural dan menurunnya kualitas pelayanan.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Urgensi transformasi Kanim Bandung menjadi lebih nyata ketika dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan wilayah kerja, khususnya dalam menghadapi gelombang investasi asing di kawasan industri Subang dan Karawang. Proyek pembangunan pabrik kendaraan listrik oleh perusahaan otomotif global, seperti BYD, diperkirakan akan menarik ribuan tenaga kerja asing (TKA) ke wilayah Jawa Barat. Sebagai wilayah yurisdiksi pelayanan Kanim Bandung, lonjakan TKA ini akan berdampak langsung pada permohonan izin tinggal, visa kerja, dan intensifikasi pengawasan terhadap aktivitas orang asing. Hal ini menandakan bahwa beban kelembagaan ke depan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif.

Masuknya investasi asing dalam skala besar tidak bisa hanya dibaca sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai indikator tekanan administratif terhadap sistem keimigrasian. Peningkatan permohonan visa dan izin tinggal, serta potensi pelanggaran keimigrasian oleh tenaga kerja asing, menuntut Kantor Imigrasi memiliki struktur yang mampu merespons dengan cepat dan akurat. Kantor Imigrasi Kelas I biasa tidak memiliki keleluasaan struktur yang memungkinkan pembagian fungsi kerja secara mendalam, seperti yang dimiliki Kanim Khusus. Akibatnya, proses pelayanan dan pengawasan rentan terhadap keterlambatan, overload, dan lemahnya pengendalian internal.

Lebih lanjut, struktur organisasi Kanim Khusus memungkinkan pembentukan bidang-bidang strategis seperti Bidang Pemeriksaan Keimigrasian, Bidang Izin Tinggal, dan Bidang Intelijen Penindakan, yang masing-masing memiliki subdivisi tersendiri. Struktur ini memberikan keleluasaan dalam merespons perubahan lingkungan eksternal dengan strategi yang lebih terfokus dan sistematis. Sementara itu, struktur Kanim Bandung yang masih berbasis Kelas I biasa membuat banyak fungsi harus dirangkap oleh satu seksi, tanpa pembedaan peran dan keahlian yang jelas. Situasi ini jelas tidak ideal, apalagi ketika beban kerja meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor industri dan tenaga kerja asing.

Bandung juga merupakan kota yang kerap menjadi tuan rumah bagi kegiatan internasional seperti konferensi, pertukaran pelajar, dan kolaborasi riset. Hal ini meningkatkan frekuensi masuknya orang asing yang memerlukan visa kunjungan, izin tinggal terbatas, hingga kartu izin tinggal tetap (KITAP). Semua ini berada dalam lingkup kerja Kanim Bandung. Oleh karena itu, institusi yang melayani dan mengawasi orang asing ini memerlukan struktur yang tidak hanya besar, tetapi juga fleksibel, responsif, dan proporsional terhadap dinamika perlintasan internasional. Pembiaran terhadap struktur yang tidak relevan dengan tantangan wilayah hanya akan menghasilkan disfungsi administratif.

Dari sisi tata kelola kelembagaan, penguatan struktur tidak semata-mata berarti menambah jumlah pegawai atau memperluas unit kerja, tetapi bagaimana struktur tersebut dapat menjamin kecepatan, ketepatan, dan akurasi pelayanan publik. Kanim Khusus dirancang dengan orientasi tersebut, bekerja secara berbasis fungsi, bukan sekadar urutan birokrasi. Dalam jangka panjang, struktur seperti ini lebih mampu menjaga kualitas layanan dan mencegah stagnasi organisasi di tengah perubahan lingkungan yang dinamis. Maka, peningkatan status kelembagaan menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam penguatan fungsi negara.

Mengacu pada prinsip dalam Teori Kontingensi, struktur organisasi yang tidak disesuaikan dengan lingkungan strategisnya akan mengalami penurunan efektivitas (Donaldson, 2001). Dalam hal ini, Kanim Bandung menghadapi tekanan dari luar organisasi berupa pertumbuhan migrasi, masuknya investasi asing, dan ekspansi wilayah kerja. Oleh karena itu, transformasi status kelembagaan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus merupakan penyesuaian yang logis dan relevan, bukan sekadar dorongan administratif, melainkan kebutuhan sistemik berdasarkan perkembangan lingkungan.

Selain sebagai bentuk adaptasi struktural, peningkatan status kelembagaan juga akan memperkuat legitimasi Kantor Imigrasi dalam melakukan koordinasi lintas instansi, baik di tingkat daerah maupun pusat. Kanim Khusus umumnya diberikan otoritas yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, serta kerjasama strategis dengan instansi luar. Bagi Bandung, yang merupakan pusat administrasi dan ekonomi regional, keleluasaan tersebut akan sangat penting dalam menjamin sinergi antara fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian dengan program-program pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek strategis, baik dari sisi posisi geografis, proyeksi peningkatan migrasi tenaga kerja asing, maupun dinamika kerja kelembagaan di daerah urban-industrial seperti Bandung, maka transformasi status kelembagaan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI merupakan langkah yang tidak hanya relevan tetapi juga mendesak. Transformasi ini akan menjadi dasar struktural yang solid untuk mewujudkan pelayanan keimigrasian yang adaptif, responsif, dan sejajar dengan tantangan masa depan di wilayah strategis nasional seperti Bandung.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis beban kerja dan kompleksitas pelayanan keimigrasian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menghadapi tekanan operasional yang sangat tinggi, baik dari sisi volume permohonan paspor, intensitas tindakan administratif seperti deportasi, maupun cakupan layanan yang

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

tersebar di berbagai titik wilayah. Struktur organisasi yang masih berstatus Kelas I biasa tidak mampu secara optimal menampung kompleksitas tugas tersebut, karena terbatasnya jumlah bidang, subdivisi fungsi, dan kapasitas pengelolaan lintas unit. Ketimpangan antara beban kerja dan struktur kelembagaan berisiko menurunkan efektivitas layanan, memperbesar potensi kesalahan prosedural, serta menghambat fungsi pengawasan keimigrasian yang akuntabel. Dengan demikian, peningkatan status menjadi Kanim Kelas I Khusus TPI merupakan langkah strategis yang mendesak untuk menjamin kualitas pelayanan dan penguatan tata kelola kelembagaan secara menyeluruh. Selain itu, dari sisi posisi strategis dan proyeksi dinamika keimigrasian, wilayah kerja Kanim Bandung diprediksi akan mengalami lonjakan permohonan izin tinggal dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing akibat ekspansi investasi asing di kawasan Subang dan Karawang. Kota Bandung, sebagai ibu kota provinsi dengan karakteristik mobilitas dan ekonomi tinggi, belum memiliki status kelembagaan yang setara dengan kota-kota besar lain seperti Jakarta dan Surabaya, padahal beban dan fungsinya setara bahkan lebih kompleks. Dengan memperhatikan prinsip adaptasi organisasi terhadap lingkungan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kontingensi, transformasi Kanim Bandung menjadi Kelas I Khusus TPI merupakan bentuk respons kelembagaan yang logis, evidence-based, dan sejalan dengan prinsip efektivitas kelembagaan dalam administrasi publik modern.

DAFTAR REFERENSI

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge. https://www.routledge.com/The-New-Public-Service-Serving-Not-Steering/Denhardt-Denhardt/p/book/9781138891258

Donaldson, L. (2001). *The Contingency Theory of Organizations*. Sage Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-contingency-theory-of-organizations/book226875

Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kemenimipas. (2024). *Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/316822/permen-imipas-no-1-tahun-2024

Kettl, D. F. (2015). *The Transformation of Governance: Public Administration for the Twenty-First Century*. Johns Hopkins University Press. https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/transformation-governance

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/133137/permenkumham-no-23-tahun-2019

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285154/permenkumham-no-9-tahun-2024

Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2015). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector* (8th ed.). McGraw-Hill Education.